

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

LINA AGUSTINA*, M. FACHRI ADNAN, SYAMSIR

Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

*linaagustinaharahab96@gmail.com

Abstract: *Good governance, namely the administration of government that is effective, efficient, transparent, accountable, and responsible. This study aims to find out how the implementation of good governance in Indonesia is both theoretical and practical and how to solve it. With a systematic approach to Literature Review in journals that have been published from 2016 to 2021, the results show that current good governance research focuses on the topic of implementing the principles of good governance. The method that is often used in good governance research is a qualitative approach. The cause of problems in the implementation of good governance in Indonesia is the lack of transparency of the Indonesian government in meeting the needs of the community. solutions to problems in implementing good governance are strengthening civil society groups is designed to make government institutional reforms transparent, accountable and efficient.*

Keywords: *Systematics Literature Review, good governance.*

Abstrak: good governance, ialah pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi good governance di Indonesia sistem teoritis ataupun praktis dan bagaimana solusi pemecahannya. Dengan pola pendekatan Sistematis Literatur Review pada jurnal yang sudah dipublikasikan sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 maka didapat hasil bahwa penelitian good governance saat ini berfokus pada topik implementasi prinsip-prinsip good governance, Metode yang sering digunakan dalam penelitian good governance adalah dengan pendekatan kualitatif. Penyebab permasalahan dalam implementasi good governance di Indonesia adalah kurangnya transparansi pemerintahan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. solusi jawaban dari permasalahan dalam implementasi good governance adalah menguatnya kelompok-kelompok masyarakat sipil didesain agar reformasi institusi pemerintah dapat transparan, akuntabel, dan efisien.

Kata Kunci: Systematic Literature Review, good governance.

A. Pendahuluan

Orang-orang di negara kita saat ini menginginkan pemerintahan yang menjamin pemerintahan yang baik: pejabat pemerintah yang efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Efektif berarti pelaksanaannya berjalan tepat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, bahwa pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan efektif, dan transparansi berarti bahwa semua kebijakan yang dilaksanakan oleh manajer publik terbuka dan di bawah kendali langsung oleh semua orang berarti itu dapat dievaluasi. aktivitas sendiri. Untuk hasil yang dicapai, akuntabilitas berarti bahwa pejabat pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang ditetapkan dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka pada semua warga negara pada akhir setiap tahun administrasi. Pemerintahan yang bersih biasanya dilakukan di negara-negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Jenis pemerintahan ini juga dikenal sebagai pemerintahan yang baik. *Good governance* hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparat birokrasi tanpa KKN. Tata pemerintahan yang baik merupakan premis utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta tanpa KKN (korupsi, kolusi, dan autokrasi). Salah satu opsi strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyediaan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi strategi pelayanan publik untuk mulai menerapkan *good governance*. Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan

otoriter (*clean and good governance*) merupakan cita-cita dan harapan setiap bangsa. Cita-cita pemerintahan yang baik adalah misi setiap administrasi publik, termasuk Indonesia. Tata pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai prinsip pemerintahan yang memungkinkan pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang andal, dan akuntabilitas publik. Tata kelola didefinisikan sebagai mekanisme, praktik dan prosedur pemerintah dan warga negara untuk mengelola sumber daya dan memecahkan masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya sebagai salah satu aktor dan tidak selalu mengambil keputusan.

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sangat penting dalam kinerja pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah telah merancang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kemungkinan perubahan administrasi untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik. Data-data yang dikumpulkan adalah jurnal yang membahas tentang implementasi *good governance* di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021. Data-data tersebut diidentifikasi menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Dengan menggunakan metode SLR, jurnal dapat direview dan diidentifikasi secara sistematis yang masing-masing mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan. Selain itu dengan metode SLR dapat menghindari pengenalan subyektif, dan diharapkan hasil pengenalan tersebut dapat ditambahkan pada literatur tentang penggunaan metode SLR dalam pengenalan jurnal.

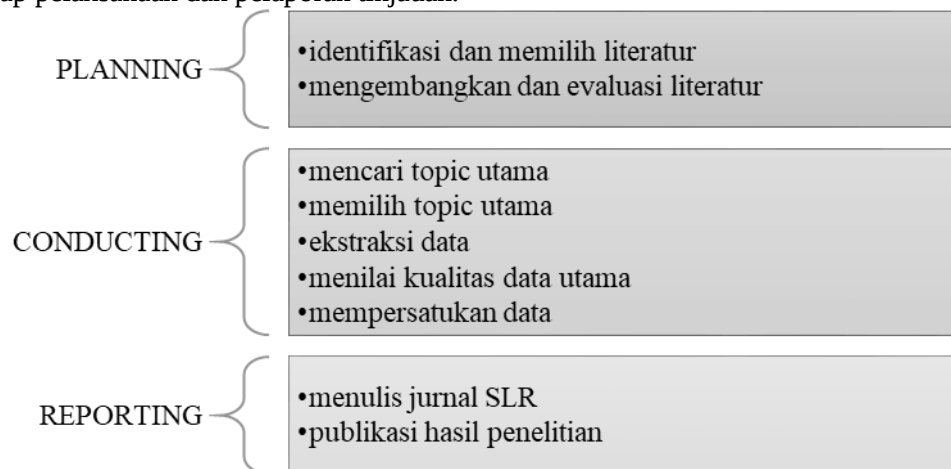
Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik. Hadiah Konsep *good governance* membutuhkan sinergi antara tiga aktor utama: pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Ketiga aktor ini berperan dalam pengelolaan sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. Tata kelola yang baik, sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia, didefinisikan sebagai praktik tata kelola atau *governance* di pemerintahan yang kuat dan akuntabel sesuai dengan prinsip pasar yang efisien dan prinsip administrasi dan politik anti korupsi. Baik di sektor publik maupun swasta, ini merupakan inovasi atau terobosan terkini dalam upaya menciptakan tata kelola yang sehat. Tata pemerintahan yang baik hadir sebagai bentuk solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul di negara tersebut. Tata kelola yang baik mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk membantu mencapai konsensus umum bahwa implementasi dapat dipertimbangkan dan efektif dan efisien. Berfokus pada nilai tata kelola yang baik meminimalkan kemunduran implementasi kebijakan karena program yang ada didasarkan pada keputusan kolaboratif. (Handayani & Nur, 2019).

Secara umum, pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang disediakan dan dilindunginya. Dengan demikian, pemerintahan sektor publik didefinisikan sebagai proses pemerintahan yang baik dengan melibatkan politisi dalam berbagai tindakan ekonomi, sosial dan politik dan dengan menggunakan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk kepentingan rakyat. Hal ini dicapai dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Konferensi Tata Kelola Dunia, UNDP 1999.). (DUARMAS et al., 2016). *Systematic Literature Review* istilah yang digunakan untuk merujuk pada metode penelitian tertentu atau pengembangan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian terkait pada subjek tertentu. Penelitian SLR dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan semua studi yang tersedia dengan bidang studi yang menarik bagi fenomena tersebut bersama dengan pertanyaan penelitian yang relevan yang diidentifikasi. SLR juga diharuskan untuk mendefinisikan program penelitian sebagai bagian dari tesis atau tesis, dan sebagai bagian dari aplikasi hibah penelitian.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan sistematis untuk meninjau literatur tentang implementasi *good governance* di Indonesia. *Systematic Literature Review* (SLR) sekarang menjadi metode tinjauan mapan dalam *good governance*. *Systematic Literature Review* bertujuan untuk proses mendapati, menilai, dan menafsirkan semua bukti temuan yang ada dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan studi tertentu (Kitchenham & Charters, 2007). Tinjauan pustaka ini

telah dilakukan sebagai *Systematic Literature Review* berdasarkan pedoman asli yang diusulkan oleh Kitchenham & Charters (2007). Metode ulasan, gaya, dan beberapa tokoh dalam bagian ini juga dimotivasi oleh (Unterkalmsteiner et al., 2011) dan (Radjenović et al., 2013). Seperti ditunjukkan dalam Gambar 1, SLR dilakukan dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tinjauan literatur. Pada langkah pertama persyaratan untuk *review* sistematis diidentifikasi (Langkah 1). Tujuan melakukan tinjauan pustaka dibahas dalam pendahuluan bab ini. Kemudian, tinjauan sistematis yang ada pada implementasi *good governance* diidentifikasi dan ditinjau. Protokol tinjauan dirancang untuk mengarahkan pelaksanaan tinjauan dan mengurangi kemungkinan bias peneliti (Langkah 2). Ini mendefinisikan pertanyaan penelitian, strategi pencarian, proses pemilihan studi dengan kriteria inklusi dan eksklusi, penilaian kualitas, dan akhirnya ekstraksi data dan proses sintesis. Protokol tinjauan disajikan, dikembangkan, dievaluasi dan ditingkatkan secara berulang selama tahap pelaksanaan dan pelaporan tinjauan.

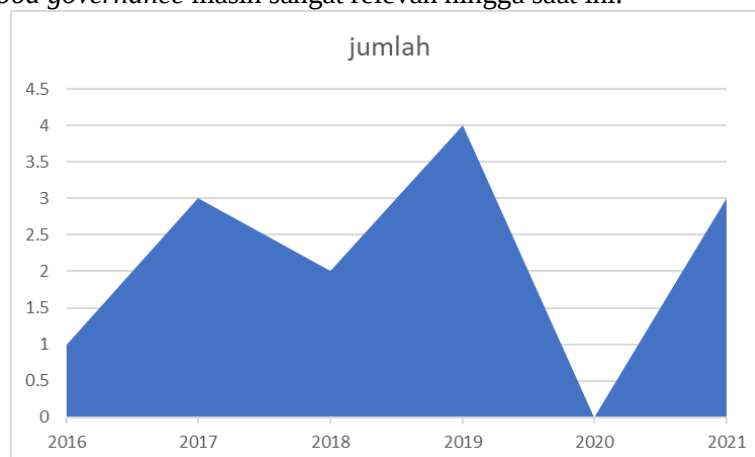


Gambar 1. Langkah-langkah Sistematis Literatur Review

C.Hasil dan Pembahasan

1.Publikasi Jurnal yang Signifikan

Dalam ulasan *Systematic Literature Review* (SLR) ini, ada 13 jurnal yang menganalisis kinerja peningkatan *good governance*. Setiap tahun terdapat jurnal yang membahas mengenai peningkatan *good governance* di Indonesia, bahkan terbanyak pada tahun 2019 beberapa jurnal dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif membahas mengenai peningkatan *good governance* di Indonesia. Gambar 4 juga menunjukkan bahwa bidang penelitian tentang peningkatan *good governance* masih sangat relevan hingga saat ini.



Gambar 2. Distribusi Studi Dipilih selama 10 Tahun

Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dari 12 jurnal yang dianalisis untuk pengambilan keputusan, ditemukan bahwa semua jurnal terindeks oleh *Science and Technology Index* (SINTA). Berikut adalah presentasi yang lebih rinci

No	Nama	Tahun	Judul Jurnal Publikasi
1	Andriyadi, Fauza	2019	<i>Good Governance Government and Government</i>
2	Handayani, Fitria Andalus Nur, Mohamad Ichsana	2019	Implementasi <i>Good Governance</i> Di Indonesia
3	Bolango, Bone	2018	Penerapan implementasi prinsip <i>good governance</i>
4	Basri, Yesi Mutia Azlina, Nur Arfendi, Leidia Zurni	2021	<i>Financial Management, Organizational Commitment and Legislative Role on the Implementation of Good Governance at Village Governments</i>
5	Affan, Ibnu	2021	<i>Effect of law enforcement to creating good governance based on justice values</i>
6	Dianingrum, Silvia	2017	Implementasi <i>good governance</i> dalam pengelolaan dana desa dengan perspektif syariah di desa mliriprowo kecamatan arik kabupaten Sidoarjo
7	Duarmas, Darmanerus Rumapea, Patar. Rompas, Welson Yappi	2016	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat
8	ASolikhudin, Muhammad	2017	Penerapan <i>Good Governance</i> di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer
9	Bela, Herwin Sagita Utama, Alip Susilowati	2019	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa
10	Astuti, Titiek Puji Yulianto, Yulianto	2016	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
11	Muhammad, Kurniawan	2017	Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12	Arifin Rivai, Aspin Nur Bastari, Gema Ramadhan	2019	Paradoks Penerapan <i>Good Governance</i> Di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis Mp3Ei
13	Abdurahim, Ahim Sofyani, Hafiez Wibowo, Sigit Arie	2018	Membangun <i>Good Governance</i> di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia

2. Topik Penelitian

Penelitian tentang implementasi *good governance* adalah topik penelitian yang paling signifikan dibidang *good governance*. Analisis studi primer yang dipilih mengungkapkan bahwa penelitian implementasi *good governance* di Indonesia berfokus 5 topik yaitu: 1) Mengidentifikasi permasalahan implementasi *good governance*; 2) Mencari permasalahan terbanyak yang dihadapi dalam peningkatan *good governance*; 3) Menemukan penyebab terjadinya permasalahan dalam peningkatan *good governance*; 4) Memilih solusi jawaban dari permasalahan implementasi *good governance*; 5) Membuat kesimpulan solusi jawaban terlengkap dan terbaik dari semua penelitian tentang implementasi *good governance*

Pada penelitian yang dilakukan oleh .(Bela & Utama, 2019), (DUARMAS et al., 2016), (Bolango, n.d.), (Prinsip et al., 2021) dan (Astuti & Yulianto, 2016) yaitu mengidentifikasi

implementasi *good governance* di Indonesia yang lebih fokus membahas tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia. Pada topik selanjutnya permasalahan terbanyak yang dihadapi dalam implementasi *good governance* di Indonesia yang dibahas oleh beberapa penelitian yaitu, (Solikhudin, 2017), (Muhammad, 2017), dan (Abdurahim et al., 2018). Permasalahan yang lain adalah tidak adanya identifikasi dan penyempurnaan celah demokrasi sebagai keseluruhan sistem bernegara menuju tatanan yang lebih baik (Solikhudin, 2017). Kemudian pada topik yang selanjutnya menemukan penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasi *good governance* di Indonesia adalah kurangnya transparansi pemerintahan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Bolango, n.d.), (Astuti & Yulianto, 2016) dan (Bela & Utama, 2019).

Pada Topik keempat memilih solusi jawaban dari permasalahan dalam implementasi *good governance*. menguatnya kelompok-kelompok masyarakat sipil didesain agar reformasi institusi pemerintah dapat transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan norma-norma tersebut tertanam dalam institusi pemerintah, mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik tanpa harus dibayang-bayangi oleh monopoli atau korupsi. Artinya, *good governance* adalah prasyarat dari terciptanya iklim persaingan usaha yang bersih dari intervensi negara (Arifin Rivai & Bastari, 2019) dan (Andriyadi, 2019). Sedangkan (Handayani & Nur, 2019) mengatakan Negara yang berperan dalam pemberi layanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara adil dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahannya memegang teguh pada 3 dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu bidang lingkungan, ekonomi dan sumber daya manusia.

Dalam upaya mengoptimalkan implementasi prinsip transparansi Pada Pemerintahan perlu mengembangkan sistem informasi manajemen transparansi pemerintahan melalui *E-government*. Serta Dalam upaya mengoptimalkan implementasi prinsip daya tanggap perlu membentuk Tim Penyelesaian Sengketa (Bolango, n.d.) (2018). Kemudian pembahasan kelima yaitu solusi jawaban terlengkap dan terbaik dari semua penelitian tentang implementasi *good governance* di Indonesia ialah Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah serta Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan (Arifin Rivai & Bastari, 2019) dan (Dianingrum, 2017). Dari sejumlah jurnal yang direview, menunjukkan distribusi total topik penelitian tentang implementasi *good governance* di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peneliti membahas tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance*. peneliti memilih implementasi *good governance* sebagai topik penelitian mereka yaitu *good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik di pemerintahan, *civil society* maupun di dunia swasta. *Good governance* di pemerintahan (*public governance*), tema ini begitu menyentuh. Banyak pihak yang menyatakan bahwa masalah mendasar bangsa ini akan terselesaikan kalau birokrasi pemerintahnya sudah kembali ke jalan yang baik. Karenanya bagi aparatur pemerintah, *good governance* adalah kewajiban yang harus diwujudkan.

3. Bentuk Metode Penelitian yang Digunakan

Semua peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sejumlah 13 penelitian. pendekatan kualitatif juga banyak digunakan oleh peneliti baik dengan studi pustaka (*library research*), observasi, wawancara mendalam, atau fenomenologi. Metode yang terbaik yang seharusnya digunakan untuk meneliti tentang implementasi *good governance* di Indonesia adalah metode kualitatif. mengapa demikian? karena dengan metode tersebut permasalahan yang ada yang akan dijawab dalam suatu penelitian bisa dijelaskan dengan berbagai pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif sekaligus juga dapat dibuktikan secara statistik matematik dengan menggunakan metode kuantitatif, sehingga diperoleh hasil analisis yang lengkap.

D.Penutup

Dalam ulasan *Systematic Literature Review* ini, ada 13 jurnal yang menganalisis kinerja peningkatan *good governance*. Setiap tahun terdapat jurnal yang membahas mengenai peningkatan *good governance* di Indonesia, bahkan terbanyak pada tahun 2019 beberapa jurnal dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif membahas mengenai peningkatan *good governance* di Indonesia. Gambar 4 juga menunjukkan bahwa bidang penelitian tentang peningkatan *good governance* masih sangat relevan hingga saat ini. Kemudian pada topik yang selanjutnya menemukan penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasi *good governance* di Indonesia adalah kurangnya transparansi pemerintahan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Pada Topik keempat memilih solusi jawaban dari permasalahan dalam implementasi *good governance*. menguatnya kelompok-kelompok masyarakat sipil didesain agar reformasi institusi pemerintah dapat transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan norma-norma tersebut tertanam dalam institusi pemerintah, mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik tanpa harus dibayang-bayangi oleh monopoli atau korupsi. Kemudian pembahasan kelima yaitu solusi jawaban terlengkap dan terbaik dari semua penelitian tentang implementasi *good governance* di Indonesia ialah Tata pemerintahan yang bersifat terbuka, Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah serta Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung gugat, Instansi pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Abdurahim, A., Sofyani, H., & Wibowo, S. A. (2018). Membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 45–64. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.45-64>
- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Government. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 85–100. <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/2108>
- Arifin Rivai, A. N., & Bastari, G. R. (2019). Paradoks Penerapan Good Governance Di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis Mp3Ei. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2), 178–203. <https://doi.org/10.24252/profetik.v7i2a2>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 04(3), 126–133.
- Bolango, B. (n.d.). penerapan implementasi prinsip good governance. 2018, 6, 119–126.
- Dianingrum, S. (2017). *implementasi good governance dalam pengelolaan dana desa dengan presektif syaria di desa mliriprowo kecamatan arik kabupaten sidoarjo*.
- DUARMAS, D., RUMAPEA, P., & ROMPAS, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*.
- Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2).

- <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.2021>
- Prinsip, E., Mencegah, D., Pidana, T., & Di, K. (2021). *Eksistensi prinsip*. 4(1).
- Radjenović, D., Heričko, M., Torkar, R., & Živković, A. (2013). Software fault prediction metrics: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 55(8), 1397–1418.
- Solikhudin, M. (2017). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 163–187. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187>
- Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T., Islam, A. K. M. M., Cheng, C. K., Permadi, R. B., & Feldt, R. (2011). Evaluation and measurement of software process improvement—a systematic literature review. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 38(2), 398–424.